

PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN *INTERN* PEMERINTAH PADA KINERJA PEMERINTAH DAERAH

**M Rayindha Prasatya Yang¹
I Wayan Suartana²**

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: riyandaprasatya@gmail.com/Tlp:082341515558

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Kinerja Pemerintah Daerah merupakan performa kerja yang dicapai pemerintah daerah didalam merealisasikan target yang telah ditentukan. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruhPengaruh *Good Governance*, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) pada Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan pada 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota Bima dan masing-masing SKPD diambil empat responden yaitu satu kepala dinas dan tiga kepala sub bagian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada 132 responden dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Regresi Berganda (*Multiple Regression*). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *Good Governacne*, Pengelolaan Keuangan Daerah dan SPIP berpengaruh positif pada Kinerja Pemerintah Daerah
Kata kunci: *Good Governance*, Pengelolaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kinerja Pemerintah

ABSTRACT

Local Government Performance is the performance of local government work achieved in realizing the targets set. The purpose of this study is to determine the effect Influence of Good Governance, Financial Management and Internal Control Systems Government (SPIP) on Local Government Performance. This study was conducted in 33 work units (SKPD) in the town of Bima and each SKPD taken four respondents, the agency heads and three heads of the subdivisions. The data used in this study are primary data obtained directly by distributing questionnaires to 132 respondents using purposive sampling technique. Data analysis techniques used in this research is multiple regression (Multiple Regression). The results of this study stated that Good Governacne, Financial Management and SPIP have a positive influence on Government Performance

Keywords: *Good Governance, Financial Management, Internal Control System of the Government, the Government Performance*

PENDAHULUAN

Sektor publik secara kolektif adalah penyedia layanan terbesar di dunia. Secara tradisional, sektor publik telah dilihat sebagai kendaraan pasif untuk melaksanakan kebijakan sosial yang diamanatkan oleh undang-undang. Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin ketersediaan barang di publik dan jasa yang menjamin kesejahteraan untuk semua orang yang membutuhkan mereka. Layanan ini umumnya akan diperlukan biaya dalam jumlah besar dan sumber daya lainnya yang tersedia namun terbatas (Ramakrishnan, 05:2013). Perkembangan akuntansi sektor publik saat ini, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah (Halim dan Kusufi, 2013:1). Pertimbangan yang mendasar perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan di luar negeri (Halim dan Kusufi, 2013:1).

Kinerja pemerintah daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan masyarakat di daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan roda pemerintahan,

pembangunan dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik (Ruspina, 2013). Bastian (102:2006) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Wulandari (2011) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang telah dicapai oleh karyawan didalam merealisasikan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Variabel kinerja pemerintah daerah diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Wulandari (2011), yaitu pencapaian target kinerja kegiatan pada suatu program, ketepatan dan kesesuaian hasil, tingkat pencapaian program, dampak hasil kegiatan pada kehidupan masyarakat, kesesuaian realisasi anggaran dengan anggaran, pencapaian efisiensi operasional dan perilaku pegawai.

Adanya otonomi daerah pendayagunaan aparatur merupakan suatu tuntutan yang mampu mendukung kelancaraan dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan dengan mempraktikkan prinsip-prinsip *good governance* (Halim dan Damayanti, 2007:81). *Good Governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu (Mardiasmo, 2004:17). *Good governance* diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Indonesian *Institute of Corporate Governance* diukur dengan

empat indikator variabel yaitu: prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban (Trisnaningsih, 2007).

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kinerja pemerintah serta dalam peningkatan kualitas kinerja pemerintah perlu Sistem pengendalian *intern* pemerintah yang merupakan sistem pengendalian yang harus diterapkan dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Sukmaningrum, 2012). Menurut Arens (2010:370) sistem pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori berikut : 1) efektivitas dan efisiensi operasi, 2) keandalan dari laporan keuangan, 3) ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari pengendalian *intern* tercapai jika kelima elemen pengendalian *intern* telah cukup dan dilaksanakan. Lima elemen pengendalian intern yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan (PP No. 60 tahun 2008). Salah satu hambatan dalam pembuatan laporan keuangan di Indonesia adalah tidak adanya sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal menyebabkan lemahnya pengendalian internal (Mardiasmo, 2004:42).

Keberhasilan sebuah organisasi pemerintahan dapat diukur juga dengan melihat perspektif pengelolaan keuangannya dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang tepat dapat memberikan kepastian mengenai keberhasilan atau ketetapan suatu kegiatan sehingga pemerintah terus melakukan berbagai macam upaya untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya Ruspina (2013). Adanya pengelolaan keuangan daerah yang tepat dapat memberikan kepastian mengenai keberhasilan atau ketetapan suatu kegiatan. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim dan Damayanti, 2007: 23). Pengelolaan keuangan daerah dapat diukur melalui Laporan Realisasi APBD tersebut terdiri dari tiga bagian utama yaitu: pendapatan, belanja dan pembiayaan (Fidelius, 2013). Otonomi daerah yang seluas-luasnya mulai dilaksanakan tahun 2001 membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan di daerah, termasuk reformasi pengelolaan keuangan daerah, paling tidak ada dua alasan mengapa reorientasi dibidang ini diperlukan, yaitu (1) pelimpahan wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin kompleks, dan (2) tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, baik pada tahun tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2004:27). Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni Relevan, Handal, Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif

laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan (Sukmaningrum, 2012).

Setiap awal tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Keuangan menerapkan sistem *reward and punishment* pada pemerintah daerah. Terdapat tiga macam kriteria dalam sistem tersebut yaitu daerah telah melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan baik, daerah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tepat waktu dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Dengan demikian, adalah sangat penting bagi pemerintah daerah agar dapat menyusun laporan keuangan dengan baik. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu kriteria dalam sistem *reward and punishment* yang diterapkan Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah. Kesimpulannya, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan

yang dapat menunjukkan kondisi sebenarnya. Kelemahan di dalam sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan dan pengendalian internak antara lain berupa pencatatan transaksi yang tidak akurat atau bahkan transaksi yang tidak dicatat, aset tetap yang belum diinventarisasi hingga pencatatan persediaan yang tidak tertib.

Data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang diterbitkan oleh BPK Republik Indonesia yang merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pemeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara menyebutkan, temuan-temuan kesalahan pengelolaan keuangan yang tidak sesuai undang-undang oleh pemerintah Kota Bima periode 2011-2015 sekitar 86 temuan kasus yang merugikan negara, dengan total potensi keuangan daerah sebesar Rp 25,8 miliar. Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Potensi Nilai Kerugian Negara/Daerah Sesuai Data IHPS Tahun 2011-2015 pada Pemerintah Kota Bima (dalam juta rupiah)

No	Tahun	Nilai Kerugian Negara	Jumlah Kasus
1	2011	3.727,93	14
2	2012	17.203,9	21
3	2013	564,39	14
4	2014	3.390,86	19
5	2015	970,56	18
Total		25.857,64	86

Sumber : BPK RI 2016.

Tabel 1 menjelaskan bahwa pemerintah Kota Bima mengalami naik turunnya potensi kerugian negara dimana potensi kerugian yang terbesar terjadi pada tahun 2012 sebanyak 21 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp. 17.203.900.000 dan terkecil pada tahun 2013 berjumlah 14 kasus dengan kerugian sebesar Rp. 564.390.000. Tidakkonsistenan Kota Bima dalam menangani potensi kerugian yang

terjadi selama 2011-2015 menunjukkan kurang tanggapnya Kota Bima dalam memperbaiki kinerja pemerintah daerahnya sehingga mengakibatkan kerugian pada negara.

Selanjutnya dilihat dari Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) dan dengan diterapkannya PP No. 60 tahun 2008, pemerintah daerah yang otonom diharap mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” oleh BPK. Tetapi kenyataannya untuk mendapatkan opini WTP dari BPK sangatlah sulit. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang ada dalam pemerintahan tidak memberikan kinerja maksimal bagi satuan kerjanya. Terbukti Kota Bima selama Lima tahun terakhir mendapatkam opini audit dari BPK yang berbeda-beda. Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2 .

Tabel 2.
Opini Audit BPK untuk Kota Bima

Tahun	Opini Audit
2011	Disclaimer
2012	Wajar Dengan Pengecualian
2013	Wajar Dengan Pengecualian
2014	Wajar Tanpa Pengecualian
2015	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Bima tahun 2016

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa Pemerintah Kota Bima telah berhasil didalam melakukan perbaikan kualitas laporan keuangan, walaupun pada tahun 2010 dan 2011 Pemerintah Kota Bima mendapatkan penilaian berupa Disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat) namun pada tahun 2011-2013 pemerintah Kota Bima berhasil melakukan perbaikan didalam menyusun Laporan Keuangan sehingga

mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan pada tahun 2014 pemerintah Kota Bima mendapatkan Opini Auditor Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2009) dan Budi (2009) yang menguji Pengaruh *Good Governance* pada kinerja pemerintah daerah menunjukkan hasil adanya pengaruh positif. Selain itu, dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Herminingsih (2009) mengatakan adanya pengaruh positif antara pengelolaan keuangan daerah pada kinerja pemerintahan daerah. Begitupula hasil penelitian Afrida (2013), Alamanda (2013) dan Yolanda (2013) yang menemukan adanya pengaruh positif diantara SPIP pada kinerja pemerintah daerah.

Idirwan (Halim dan Damayanti, 2007:81) menyatakan bahwa dengan adanya otonomi daerah pendayagunaan aparatur merupakan suatu tuntutan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan dengan mempraktikkan prinsip-prinsip *good governance*. *Good Governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu (Mardiasmo,15:2004). Frederickson (25:1997) memberikan pengertian mengenai *good governance* dimana suatu keahlian atau spesialisasi, layanan pada warga sipil, pembangunan lembaga, ilmu administrasi, dan asumsi dari kepentingan umum secara kolektif kolektif. Yusuf (2009) pada penelitiannya mengenai pengaruh *good governance* pada kinerja pemerintahan di kota Bandung bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan prinsip

good governance pada kinerja pemerintah daerah kota Bandung dimana terdapat korelasi yang sangat kuat antara penerapan prinsip *good governance* pada kinerja pemerintah daerah dimana apabila terjadi satu kenaikan atau penurunan tingkat *good governance* maka akan mempengaruhi pula kinerja pemerintahan.

Budi (2009) melakukan penelitian pengaruh *good governance* pada kinerja organisasi pada Dinas Kesejahteraan Sosial di Kota Palembang dimana dikemukakan hasil apabila pelaksanaan *good governance* ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri dimana besar pengaruh *good governance* pada kinerja organisasi dinas kesejahteraan sosial di kota Palembang sebesar 31,69%. Kedua pernyataan diatas mengungkapkan bahwa apabila semakin baik penerapan *good governance* disuatu daerah maka semakin baik pula kinerja pemerintahan didaerah tersebut.

H₁ : *Good governance* berpengaruh positif pada kinerja pemerintahan daerah.

Soleh dan Suripto (2011:4) menyatakan bahwa: “Kinerja pemerintah daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai tingkat pencapaian hasil, dikaitkan dengan misi dan visi organisasi, serta dampak positif dan negative yang diakibatkan dari suatu kebijakan operasional yang telah diambil. Melalui informasi tersebut, selanjutnya dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas suatu kebijakan, menetapkan kegiatan/program utama, dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan sebagai umpan balik sebagai bahan untuk perencanaan, penentuan tingkat keberhasilan, serta untuk

memutuskan suatu tindakan yang dinilai paling rasional dan menguntungkan.” Menurut Rohman (2009) pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menuntut adanya desentralisasi. Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan desentralisasi administratif, yaitu pendelegasian wewenang pelaksanaan sampai kepada tingkat hirarki yang paling rendah.

Pada penelitian Herminingsih (2009) mengatakan Ada pengaruh positif signifikan pengelolaan keuangan pada kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi pengelolaan keuangan maka akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dari dua pernyataan diatas menyatakan bahwa apabila semakin baik pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik pula kinerja pemerintahan daerah

H₂: Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada kinerja pemerintahan daerah

Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundangundangan.

Rohman (2009) kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan system pengendalian intern pemerintah

berpengaruh positif pada kinerja pemerintah daerah. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Almanda (2013) diketahui bahwa pengawasan intern berpengaruh signifikan positif pada kinerja pemerintah daerah, Yolanda (2012) menunjukkan bahwa system pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif pada kinerja manajerial SKPD, dan Afrida (2013) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif pada Kinerja Manajerial SKPD. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan hasil yang sama. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif pada kinerja pemerintahan daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:13). Penelitian berbentuk asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013:13).

Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bimayang terdiri dari 33 SKPD yang ada di kota Bima yang terdiri dari 14 Dinas, 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 11 Badan, dan 5 Kecamatan. Obyek merupakan suatu entitas yang akan diteliti. Obyek dapat berupa perusahaan, manusia, karyawan, dan lainnya (Jogiyanto,

2010). Obyek pada penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah kota Bima.

Variabel bebas (*independent variabel*) sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, *antecedent*. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah good governacne, pengelolaan keuangan daerah dan system pengendalian internal pemerintah. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar (Sugiyono, 2013:13). Data kualitatif dalam penelitian ini adalah nama-nama SKPD yang ada dikota Bima, data mengenai hasil audit BPK dan kuesioner yang digunakan oleh peneliti. Sedangkan, data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka (Sugiyono, 2013:13). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah skor jawaban yang diberikan oleh responden yang diperoleh dengan skala *Likert 5 point*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara. Data primer diperoleh melalui metode *survey* menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden (Sugiyono, 2013:14). Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan pada responden, yang diukur dengan menggunakan skala *likert 1-5* dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui data primer.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:115). Populasi dalam penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bimayang terdiri dari 33 SKPD. (<http://bimakota.go.id/post/read/>). Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Metode pengumpulan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2013:122), *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Agar penelitian ini relevan maka ditentukan kriteria dalam pengambilan sampel

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang terkait dengan penelitian secara tertulis kepada responden penelitian untuk dijawab (Sugiyono, 2013:199). Pada penelitian ini kuesioner diantarkan langsung kelokasi penelitian yaitu pada SKPD Kota Bima. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala *Likert*. Data yang digunakan berupa data *ordinal* mengacu pada penelitian Ruspina (2013) dan Herminingsih (2009). Adapun skala *Likert* yang digunakan adalah sebagai berikut:

STS	: Sangat Tidak Setuju	skor 1
TS	: Tidak Setuju	skor 2
N	: Netral	skor 3
S	: Setuju	skor 4
SS	: Sangat Setuju	skor 5

Analisis data merupakan regresi berganda (*Multiple Regession*) untuk menguji pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Kinerja Pemerintahan
- X1 = *Good governance*
- X2 = Pengelolaan Keuangan Daerah
- X3 = Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah
- α = konstanta
- b1,b2,b3 = Koefisien regresi dari masing-masing variabel
- ϵ = Epsilon (variabel-variabel independen lainnya yang diukur dalam penelitian yang mempunyai pengaruh pada variabel).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi variabel penelitian menjabarkan informasi masing-masing variabel penelitian dan statistik deskriptif masing-masing variabel untuk memberikan gambaran tentang karakteristik masing-masing variabel penelitian, antara lain mean, minimum, maksimum dan standar deviasi. Pengukuran rata-rata (*mean*) merupakan cara yang paling umum digunakan untuk mengukur nilai sentral suatu distribusi data. Nilai minimum merupakan nilai yang paling rendah dari suatu distribusi data. Nilai maksimum merupakan nilai yang tertinggi dari suatu distribusi data. Sedangkan standar deviasi adalah perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata-rata. Hasil lengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3.

Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std deviation
good governance	124	40	55	48,79	3,81
pengelolaan keuangan daerah sistem pengendalian intern pemerintah	124	30	45	39,34	3,22
kinerja pemerintah valid N	124	30	75	65,77	6,28
	124	27	35	32,05	2,09

Sumber: Data diolah

Berdasarkan statistik deskriptif sesuai dengan Tabel 3 diperoleh nilai minimum dari good governance sebesar 40 sedangkan nilai maksimum sebesar 55. Nilai rata-rata dari *good governance* sebesar 48,7 dan standar deviasi sebesar 3,81. Berdasarkan statistik deskriptif sesuai dengan Tabel 3 diperoleh nilai minimum dari pengelolaan keuangan daerah sebesar 30 sedangkan nilai maksimum sebesar 45. Nilai rata-rata dari pengelolaan keuangan daerah sebesar 39,3 dan standar deviasi sebesar 3,2. Berdasarkan statistik deskriptif sesuai dengan Tabel 3 diperoleh nilai minimum dari sistem pengendalian *intern* pemerintah sebesar 30 sedangkan nilai maksimum sebesar 75. Nilai rata-rata dari sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 65,7 dan standar deviasi sebesar 6,2.

Berdasarkan statistik deskriptif sesuai dengan Tabel 3 diperoleh nilai minimum dari kinerja pemerintah sebesar 27 sedangkan nilai maksimum sebesar 35. Nilai rata-rata dari kinerja pemerintah sebesar 32,05 dan standar deviasi sebesar 2,08.

Pengujian instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan bantuan program *Statistical Package of Sosial Science* (SPSS) 22.0 sebagai berikut.

Uji validitas merupakan pengujian instrumen penelitian sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang inti atau arti sebenarnya yang diukur. Tinggi rendahnya validitas menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Suatu kuesioner dikatakan valid jika tiap butir pernyataan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Pengujian validitas tiap butir menggunakan analisis item yaitu, mengkorelasikan skor tiap butir atau faktor dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Syarat minimum suatu kuisisioner untuk memenuhi validitas adalah jika korelasi antara butir dengan skor total tersebut positif dan nilainya lebih besar dari 0,30. Adapun hasil dari uji validitas dapat ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Pearson Product	Valid
<i>Good Governance</i>	X1.1	0,957	Valid
	X1.2	0,955	Valid
	X1.3	0,960	Valid
	X1.4	0,957	Valid
	X1.5	0,964	Valid
	X1.6	0,966	Valid
	X1.7	0,962	Valid
	X1.8	0,961	Valid
	X1.9	0,961	Valid
	X1.10	0,976	Valid
	X.1.11	0,970	Valid
Pengelolaan Keuangan Daerah	X2.1	0,936	Valid
	X2.2	0,932	Valid
	X2.3	0,947	Valid
	X2.4	0,962	Valid
	X2.5	0,962	Valid
	X2.6	0,955	Valid
	X2.7	0,962	Valid
	X2.8	0,916	Valid
	X2.9	0,959	Valid
	X3.1	0,912	Valid
	X3.2	0,901	Valid
	X3.3	0,842	Valid
	X3.4	0,856	Valid

Variabel	Item	Pearson Product	Valid	
SPIP	X3.5	0,852	Valid	
	X3.6	0,880	Valid	
	X3.7	0,880	Valid	
	X3.8	0,842	Valid	
	X3.9	0,821	Valid	
	X3.10	0,852	Valid	
	X.3.11	0,842	Valid	
	X3.12	0,866	Valid	
	X3.13	0,863	Valid	
	X3.14	0,853	Valid	
	X3.15	0,916	Valid	
	Kinerja Pemerintah	y1	0,938	Valid
		y2	0,938	Valid
		y3	0,937	Valid
		y4	0,862	Valid
y5		0,918	Valid	
y6		0,938	Valid	
y7		0,934	Valid	

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4. instrumen-instrumen pada setiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai korelasi diatas 0,30 sehingga dapat disimpulkan bahwa, seluruh butir dalam instrumen penelitian ini dikatakan valid atau dapat dinyatakan layak digunakan sebagai alat ukur.

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrument pengukuran dimana pengujiannya dapat dilakukan secara internal, yaitu pengujian dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada. Adapun hasil dari uji realibilitas dapat ditunjukkan pada Tabel 5

Tabel 5.
Hasil uji reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	<i>Good governance</i>	0,992	Reliabel
2.	Pengelolaan Keuangan	0,986	Reliabel
3.	SPIP	0,976	Reliabel
4	Kinerja	0,971	Reliabel

Sumber :Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 5, nilai *Cronbach's Alpha* untuk setiap variabel lebih besar dari 0,6. Jadi, dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel telah memenuhi syarat reliabilitas atau dapat dikatakan reliabel sehingga, dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual dalam model regresi penelitian ini mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada Tabel. 4.10 Sebagai berikut. Berdasarkan uji normalitas bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah 0,476 dan nilai *asympt.Sig (2-tailed)* sebesar 0,455. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara statistik nilai *Asymp.sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yang berarti data terdistribusi secara normal. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Suatu model regresi dapat dikatakan baik jika tidak terjadi multikolinearitas di dalamnya. Model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah yang memiliki nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan mempunyai angka *tolerance* lebih dari 10%.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, nilai *tolerance* variabel bebas lebih dari 10% atau 0.1 dimana nilai *tolerance* dari *good governance* sebesar 0,647,

pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,659, SPIP sebesar 0,693. Nilai VIF kurang dari 10 dimana nilai VIF dari *good governance* sebesar sebesar 1,547, pengelolaan keuangan daerah sebesar 1,517, SPIP sebesar 1,444. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel bebas dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan tingkat signifikansi berada di atas 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam model regresi ini tidak terdapat heterokedastisitas. Uji kesesuaian model (uji F) dimaksudkan dalam rangka mengetahui apakah dalam penelitian ini model yang digunakan layak untuk digunakan atau tidak sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel independen pada variabel dependennya. Hasil pengujian disajikan dalam Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6.
Hasil uji Kesesuaian Model

Model	Sum of square	F	Sig
Regression	529,629	261,416	0,00
Residual	81,040		
Total	610,669		

Sumber :Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa pada model memiliki nilai sig sebesar 0,00 lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$ menunjukkan model penelitian ini layak untuk digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel *good governance*, pengelolaan keuangan daerah, dan SPIP berpengaruh secara bersama-sama pada variabel dependennya yaitu kinerja pemerintah.

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan perubahan variabel terikatnya. Pada penelitian ini koefisien determinasi dilihat melalui nilai R^2 yang terlihat pada Tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 7.
Hasil Koefisien Determinasi Model

Model	R	R square	Adjusted square	R	Std. Error of the estimate
1	0,931	0,867	0,864		0,821

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai R^2 pada model sebesar 0,867. Nilai R^2 Pada model yang artinya 86,7 persen perubahan kinerja pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel *good governance*, pengelolaan keuangan daerah dan SPI dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.

Uji statistik t pada dasarnya dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji statistik dilakukan dengan membandingkan hasil nilai signifikansi dengan $\alpha=0,05$ dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 8.
Hasil Analisis Uji t

VARIABEL	Koefisien Regresi	t_{hitung}	Sig	Hasil Hipotesis
X_1	0,261	10,789	0,000	H_0 ditolak
X_2	0,187	6,614	0,000	H_0 ditolak
X_3	0,148	10,478	0,000	H_0 ditolak

Sumber :Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 8. diperoleh nilai signifikansi uji t satu sisi untuk variabel *good governance* sebesar 0,00 maka tingkat signifikansi t pada uji satu sisi adalah 0,00

lebih kecil dari $\alpha=0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,261 maka H_0 ditolak dan hal ini mengindikasikan bahwa *good governance* berpengaruh positif pada kinerja pemerintah sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Berdasarkan Tabel 8. diperoleh nilai signifikansi uji t satu sisi untuk variabel pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,00 maka tingkat signifikansi t pada uji satu sisi adalah 0,00 lebih kecil dari $\alpha=0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,187 maka H_0 ditolak dan hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif pada kinerja pemerintah sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

Berdasarkan Tabel 8. diperoleh nilai signifikansi uji t satu sisi untuk variabel SPIP sebesar 0,00 maka tingkat signifikansi t pada uji satu sisi adalah 0,00 lebih kecil dari $\alpha=0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,148 maka H_0 ditolak dan hal ini mengindikasikan bahwa SPIP berpengaruh positif pada kinerja pemerintah sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh positif pada kinerja sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Idirwan (Halim dan Damayanti, 2007:81) menyatakan bahwa dengan adanya otonomi daerah pendayagunaan aparatur merupakan suatu tuntutan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan dengan mempraktikkan prinsip-prinsip *good governance*. *Good Governance* adalah suatu tatanan kehidupan

berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu (Mardiasmo, 15:2004). Frederickson (25:1997) memberikan pengertian mengenai *good governance* dimana suatu keahlian atau spesialisasi, layanan pada warga sipil, pembangunan lembaga, ilmu administrasi, dan asumsi dari kepentingan umum secara kolektif kolektif.

Yusuf (2009) pada penelitiannya mengenai pengaruh *good governance* pada kinerja pemerintahan di kota Bandung bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan prinsip *good governance* pada kinerja pemerintah daerah kota Bandung dimana terdapat korelasi yang sangat kuat antara penerapan prinsip *good governance* pada kinerja pemerintah daerah dimana apabila terjadi satu kenaikan atau penurunan tingkat *good governance* maka akan mempengaruhi pula kinerja pemerintahan.

Budi (2009) melakukan penelitian pengaruh *good governance* pada kinerja organisasi pada Dinas Kesejahteraan Sosial di kota Palembang dimana dikemukakan hasil apabila pelaksanaan *good governance* ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri dimana besar pengaruh *good governance* pada kinerja organisasi dinas kesejahteraan sosial di kota Palembang sebesar 31,69%. Kedua pernyataan sebelumnya dan ditambah dengan hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa apabila semakin baik penerapan *good governance* disuatu daerah maka semakin baik pula kinerja pemerintahan didaerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif pada kinerja sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Soleh dan Suripto (2011:4) menyatakan bahwa: “Kinerja pemerintah daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai tingkat pencapaian hasil, dikaitkan dengan misi dan visi organisasi, serta dampak positif dan negatif yang diakibatkan dari suatu kebijakan operasional yang telah diambil. Melalui informasi tersebut, selanjutnya dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas suatu kebijakan, menetapkan kegiatan/program utama, dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan sebagai umpan balik sebagai bahan untuk perencanaan, penentuan tingkat keberhasilan, serta untuk memutuskan suatu tindakan yang dinilai paling rasional dan menguntungkan.” Menurut (Rohman, 2009) pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menuntut adanya desentralisasi. Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan desentralisasi administratif, yaitu pendelegasian wewenang pelaksanaan sampai kepada tingkat hirarki yang paling rendah.

Pada penelitian Herminingsih (2009) mengatakan Ada pengaruh positif signifikan pengelolaan keuangan pada kinerja pemerintah daerah. Semakin pengelolaan keuangan maka akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian mengindikasikan bahwa SPIP berpengaruh positif pada kinerja sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan

yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundangundangan.

(Rohman, 2009) kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh positif pada kinerja pemerintah daerah. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Almanda, 2013) diketahui bahwa pengawasan intern berpengaruh signifikan positif pada kinerja pemerintah daerah, (Yolanda, 2012) menunjukkan bahwa sistem pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh signifikan positif pada kinerja manajerial SKPD, dan (Afrida, 2013) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah berpengaruh signifikan positif pada Kinerja Manajerial SKPD. Ketiga penelitian yang dijelaskan sebelumnya ditambah dengan hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa semakin baik SPIP maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan good governance berpengaruh positif pada

kinerja pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif pada kinerja pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif pada pemerintah. Hal ini berarti semakin meningkat SPIP maka kinerja pemerintah semakin baik.

Saran yang ingin peneliti berikan yaitu untuk pemerintah Kota Bima agar bersama-sama meningkatkan konsistensi dalam penerapan *good governance*, pengelolaan keuangan daerah dan SPIP, sehingga kinerja pemerintah daerah dapat terlaksana secara lebih baik dan optimal agar tidak menimbulkan kerugian pada negara. Setelah menganalisa peraturan mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maka perlu ditinjau kembali, sehingga pengelolaan keuangan daerah lebih baik. Dalam pengukuran kinerja sebaiknya menggunakan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) daerah sehingga mencerminkan secara langsung kinerja pemerintah.

REFERENSI

- Afrida, Nur. 2013. Pengaruh Desentralisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang). *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang.
- Arens, Alvin .A, Randal J.Elder, dan Mark S. Beasley. 2010. *Auditing and Assurance Services: An Intergrated Approach*, 13th Edition, New Jersey: Pearson, Prentice Hall Inc.
- Asian Development Bank, 1999. *Governance: Sound Development Management*.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO), 2009. *Internal Control-Intergrated Framework*, New York: AICPA Publication.

- Fidelius.2013. Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1(4): h: 2088-2096.
- Frederickson, H. George. 1997. *The Spirit of Public Administration*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- IAPI. 2013. Standar Perikatan Audit (“Spa”) 700 Modifikasi Pada Opini Dalam Laporan Auditor Independen. Dewan Standar Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia. Jakarta.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sector Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2 (1): h:1-17
- Pemerintah Kabupaten Sleman. Pentingnya Laporan Keuangan. <http://inspektorat.slemankab.go.id/>. Diunduh tanggal 15 bulan Juli tahun 2016.
- Ramakrishnan R. 2013. *Delivery of Public Services-The way Forward. 31st Edition*. New Delhi India: Agni School of Business Excellence.